

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kantor merupakan suatu fasilitas yang diperuntukkan bagi orang-orang bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan serta ditetapkan bersama. Menurut Mills (dalam Nuraida, 2008), terdapat beberapa fungsi dari kantor, diantaranya yaitu menerima informasi (*to receive information*), merekam dan menyimpan data-data serta informasi (*to record information*), mengatur informasi (*to arrange information*), memberi informasi (*to give information*), dan melindungi aset (*to safeguard assets*). Kantor dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, diantaranya yaitu *commercial office*, *industrial office*, *professional office*, serta *institutional/governmental office* (Manasseh & Cunliffe, 1962). Pada perancangan ulang kali ini, jenis kantor yang terpilih sebagai objek perancangan yaitu *institutional/governmental office* atau sering disebut sebagai kantor pemerintahan.

Pada zaman sekarang telah terjadi banyak sekali perubahan maupun perkembangan, mulai dari teknologi, hingga gaya hidup yang diterapkan oleh setiap individu. Perubahan gaya hidup tersebut dapat terjadi karena setiap individu telah melakukan penyesuaian perilaku atau kebiasaan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pada zaman sekarang. Sama halnya dengan desain yang selalu memiliki *trend* tersendiri pada setiap zamannya karena menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat yang berlaku pada zaman tersebut. Akan tetapi, setiap *trend* desain pasti memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Seperti yang terdapat pada objek perancangan kali ini, Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat. Desain yang diterapkan pada objek perancangan kali ini memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari objek perancangan kali ini yaitu terletak pada aspek penghawaan alami, kondisi bangunan yang masih sangat bagus, serta kantor ini memiliki area vegetasi yang cukup luas.

Kemudian, kekurangannya terdapat pada organisasi ruang, pengaturan sirkulasi ruang, penerapan desain universal, serta belum terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana.

Setelah melakukan tahap studi banding pada tiga objek kantor, permasalahan umum yang bisa didapatkan yaitu terletak pada pengaturan organisasi ruang dan sirkulasi ruang, visualisasi desain yang masih monoton, serta masih terdapat fasilitas yang belum sesuai dengan standarisasi. Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak diatasi akan berpengaruh terhadap produktivitas bekerja para pegawainya.

Untuk itu, perlu dilakukannya tahap perancangan ulang atau *re-design* terhadap interior dari Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat agar para pegawainya dapat bekerja dengan nyaman serta lebih produktif lagi. Apabila hal tersebut dapat terwujud, maka kesejahteraan para pegawai kantor pun tentunya akan terjamin ketika berada dalam lingkungan kantor. Faktor lain yang dapat menjadi faktor pendukung agar tujuan dari perancangan ini terwujud yaitu perlunya dilakukan tahap pengkajian mengenai permasalahan, kebutuhan, serta karakter/kebiasaan dari pengguna kantor ini. Maka dari itu, rancangan desain yang akan diusulkan akan mengarah pada pendekatan *human behaviour*, dimana dengan menggunakan pendekatan tersebut akan menimbulkan suasana kantor yang ideal untuk dapat memenuhi segala kebutuhan para pegawainya. Apabila konsep ini sudah terwujud, maka interior dari kantor ini akan menjadi sebuah fasilitas yang dapat menaungi segala aktivitas para pegawai yang bekerja di kantor ini, sehingga produktivitas bekerja para pegawai di kantor ini akan meningkat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pada tahap pengembangan desain, ditemukan hasil identifikasi permasalahan yang berasal dari hasil pengumpulan data, hasil analisa dengan membandingkan data-data standar, dan juga hasil kesimpulan dari 3 objek studi banding yang meliputi; Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi

Jawa Barat, Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Berikut merupakan beberapa hasil identifikasi permasalahannya.

a. Umum

- Tema Umum

Interior pada Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat masih belum menerapkan tema maupun konsep, sehingga kondisi interior yang diterapkan pada eksisting saat ini dirasa belum dapat merepresentasikan identitas dari kantor ini serta belum dapat memenuhi kebutuhan visual para pegawainya.

- Suasana yang diharapkan

Suasana yang diharapkan dari interior kantor ini yaitu suasana interior yang asri, memiliki kesan natural yang cukup kuat, serta interior yang sifatnya tidak terlalu kaku, mengingat karakter dari para pegawainya yang selalu *enjoy* serta senang berinteraksi satu sama lain.

b. Organisasi Ruang dan *Layout*

- Program Aktivitas dan Fasilitas

Pada kondisi kantor saat ini, beberapa fasilitas yang terdapat didalamnya dirasa belum dapat menunjang aktivitas-aktivitas yang dilakukan para pegawai sepenuhnya, diantaranya yaitu seperti permasalahan furnitur-furnitur yang tidak ergonomis, kurangnya fasilitas penyimpanan khusus untuk dokumen yang menyebabkan ruang kerja menjadi berantakan, dan masih ada permasalahan lainnya.

- *Zoning* dan *Blocking*

Pengaturan *zoning* dan *blocking* pada seluruh area kantor ini dirasa belum optimal, sehingga jika ada orang baru yang datang ke kantor ini bisa saja memasuki area yang sebenarnya bersifat privasi dan tidak dikunjungi oleh sembarang orang serta

pembagian *blocking* pun masih belum teratur, sehingga berpengaruh dalam pengelompokkan hirarki.

- Sistem Sirkulasi

Permasalahan sistem sirkulasi yang terdapat pada kantor ini yaitu terletak pada ruang kerja, terutama pada pengaturan tata letak furnitur yang masih cukup berantakan serta sirkulasi pada ruang kerja terhalang oleh tumpukkan dokumen-dokumen kantor, karena tidak terdapatnya fasilitas penyimpanan yang lebih untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut.

- Hubungan Antar Ruang

Masih berhubungan dengan permasalahan *zoning* serta *blocking*, hubungan antar ruang yang diterapkan pada eksisting kantor saat ini masih dirasa belum optimal, sehingga cukup menyulitkan para pegawainya ketika melakukan aktivitas pada kantor.

c. Konsep Visual

- Konsep Material

Permasalahan yang terdapat dalam pemilihan konsep material yaitu kurangnya pengolahan material-material dengan maksimal, sehingga ruang interior kantor tidak memiliki tematik khusus serta kurangnya perawatan pada material-material yang ada, namun sebenarnya material-material tersebut memiliki kondisi yang cukup baik.

- Konsep Warna

Penerapan konsep warna pada kantor masih menjadi permasalahan, karena warna-warna yang diterapkan pada interior kantor hanya warna-warna netral seperti putih, coklat, hitam, abu-abu, dan warna netral lainnya, dimana penerapan warna-warna netral tersebut akan menghasilkan kesan yang monoton pada ruang interior.

d. Persyaratan Umum Ruang

- Pencahayaan

Pencahayaan alami pada kantor ini sebenarnya sudah cukup baik, namun terdapat beberapa area yang kekurangan bukaan (jendela) sehingga tidak dapat menerima pencahayaan tersebut dengan maksimal karena terhalang oleh ruangan lainnya. lalu yang kedua yaitu permasalahan pada pencahayaan buatan, terletak pada kurangnya pencahayaan pada kantor ketika malam hari, terutama pada area koridor bangunan bagian tengah serta area taman.

- Penghawaan

Sebetulnya, AC tersebut diterapkan hampir di seluruh ruangan yang ada pada kantor, akan tetapi, AC tersebut tidak pernah digunakan karena tidak mencukupinya daya listrik yang terdapat pada bangunan kantor, sehingga keberadaan AC tersebut tidak begitu berguna, karena pada akhirnya setiap ruangan yang ada pada kantor hanya mengandalkan penghawaan alami, ataupun menggunakan kipas angin yang memiliki daya listrik yang jauh lebih rendah.

- Keamanan

Permasalahan pada sistem keamanan yang ada pada kantor ini yaitu penerapan CCTV yang kurang, sehingga aspek keamanan pada kantor ini masih belum terjamin 100%. CCTV hanya diterapkan pada beberapa area, sedangkan bangunan kantor ini memiliki luasan yang cukup besar, dan permasalahan lain terletak pada kurang optimalnya penerapan standarisasi kemudahan serta keamanan bangunan gedung.

- Pengolahan Furnitur

Furniture-furnitur yang digunakan saat ini hanya mengedepankan aspek fungsionalitasnya saja, tanpa mempertimbangkan aspek estetika, dimana penerapan furnitur yang seperti ini akan menimbulkan suasana ruang yang membosankan, karena tidak terdapat konsep yang terarah.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul rumusan masalah yang akan menjadi pedoman dalam perancangan interior untuk Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat. Rumusan masalah tersebut yaitu:

- a. Bagaimana cara yang tepat dalam memenuhi sarana maupun prasarana yang sesuai dengan kriteria pendekatan *human behavior*?
- b. Bagaimana cara yang tepat dalam memenuhi aspek kemudahan bangunan gedung pada Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat?

### 1.4 Tujuan dan Sasaran Perancangan

#### 1.4.1 Tujuan

Merancang ulang interior Kantor BPTPH Provinsi Jawa Barat sebagai sebuah kantor pemerintahan yang memiliki fasilitas yang sesuai dengan karakteristik dan pola perilaku pengguna serta sesuai dengan kriteria pendekatan *human behavior*.

#### 1.4.2 Sasaran

Terdapat beberapa sasaran yang ingin dituju dalam pelaksanaan proses perancangan ini, diantaranya yaitu:

- a. Melakukan analisa serta mengkaji ulang apakah prinsip desain universal sudah diterapkan dengan baik atau belum pada bangunan eksisting kantor, agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam proyek perancangan tugas akhir ini.
- b. Menciptakan suasana interior yang baru dengan memanfaatkan kondisi bangunan eksisting yang masih baik serta memiliki aspek lokalitas pada elemen bangunannya, dengan menciptakan ide-ide yang lebih eksploratif, sehingga akan menciptakan suasana interior yang berbeda serta tidak monoton, dengan mengolah kembali elemen-elemen interiornya.

## 1.5 Batasan Perancangan

Batasan perancangan Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu kantor dengan tipe Dinas Daerah Provinsi tipe A diantaranya:

- a. Objek desain pada perancangan ini yaitu Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Ciganitri II, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kantor ini berada di satu lahan yang sama dengan kantor lain, yaitu Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Jawa Barat. Bangunan kantor ini hanya terdiri dari 1 lantai.
- b. Luas lahan dari objek perancangan ini yaitu sebesar  $\pm 3.500$  m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan kantor ini yaitu sebesar 1.341 m<sup>2</sup>, namun terdapat beberapa fasilitas ruang yang belum terealisasi.
- c. Ruangan-ruangan yang termasuk dalam tahap perancangan diantaranya yaitu:
  - Lobby
  - Ruang tunggu
  - Ruang Kepala Balai
  - Ruang KTU
  - Ruang Keuangan
  - Ruang Umum
  - Ruang Kepegawaian
  - Ruang Fungsional POPT
  - Ruang Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
  - Ruang Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura
  - Ruang Rapat
  - *Communal area*
  - Ruang Laktasi
  - Musholla

## **1.6 Manfaat Perancangan**

### **a. Manfaat Bagi Masyarakat / Komunitas**

Perancangan ini dapat dijadikan sebuah pedoman atau referensi bagi masyarakat mengenai desain dari interior sebuah bangunan yang nyaman, berkualitas baik, serta dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan penggunaannya, baik itu kebutuhan secara fisik maupun psikis.

### **b. Manfaat Bagi Institusi Penyelenggara Pendidikan**

Hasil dari proses perancangan ini dapat dijadikan contoh atau referensi bagi mahasiswa jurusan Desain Interior lainnya yang sedang atau akan memasuki tahap penyusunan Tugas Akhir (TA) sebagai salah satu syarat kelulusan.

### **c. Manfaat Bagi Keilmuan Interior**

Hasil dari perancangan ini dapat menjadi sebuah acuan dalam pengembangan desain atau perancangan ulang Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat yang sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan pegawai perkantoran, kelancaran dalam produktivitas bekerja, dan faktor lainnya.

## **1.7 Metode Perancangan**

Terdapat beberapa tahapan metode perancangan yang digunakan dalam melakukan proses perancangan Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat, diantaranya:

### **1.7.1 Tahap Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan data dalam proses perancangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek perancangan melalui beberapa metode, diantaranya yaitu wawancara, observasi, melakukan studi lapangan, mengambil beberapa dokumentasi, serta mendalami studi literatur terkait dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder.



#### 1.7.1.1 Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan secara langsung (*offline*) dengan mengunjungi objek perancangan. Dalam pelaksanaan wawancara ini, terdapat 2 orang narasumber, yaitu Bapak Dani selaku Kepala Balai dari Kantor BPTPH Provinsi Jawa Barat dan juga Ibu Sri selaku Koordinator Pejabat Fungsional POPT. Dari pelaksanaan wawancara ini, didapatkan banyak informasi penting yang akan digunakan dalam pengkajian berbagai hal yang berkaitan dengan citra serta program kantor. Hasil wawancara ini kemudian akan disajikan berupa catatan yang akan dipelajari serta dipahami setelahnya.

#### 1.7.1.2 Observasi

Observasi ini dilakukan secara langsung dengan mengunjungi objek perancangan. Metode observasi ini dilakukan dengan mengunjungi seluruh area yang terdapat pada bangunan Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat, yang meliputi; Resepsionis, Ruang KTU, Ruang Keuangan, Ruang OB, Koperasi, Musholla dan Tempat Wudhu, Ruang Kepegawaian, Ruang Rapat, Ruang Kepala Balai, Ruang Kelompok Fungsional POPT, Ruang Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Ruang Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura, Ruang Karaoke, Gudang Barang, Gudang Arsip, Green House, Kebun, Mess Pegawai, dan juga beberapa Toilet. Pelaksanaan observasi ini menghasilkan beberapa hasil analisa yang dikemukakan pada bagian identifikasi masalah.

#### 1.7.1.3 Studi Lapangan

Dalam pelaksanaan studi lapangan ini dilakukan pengamatan objek perancangan secara langsung, baik itu dari segi bangunan, interior, lingkungan sekitar objek perancangan, serta keadaan dari lokasi objek perancangan itu sendiri maupun objek studi banding. Proses studi lapangan ini dilakukan secara langsung dengan mengunjungi objek perancangan dan juga objek studi banding.

#### 1.7.1.4 Dokumentasi

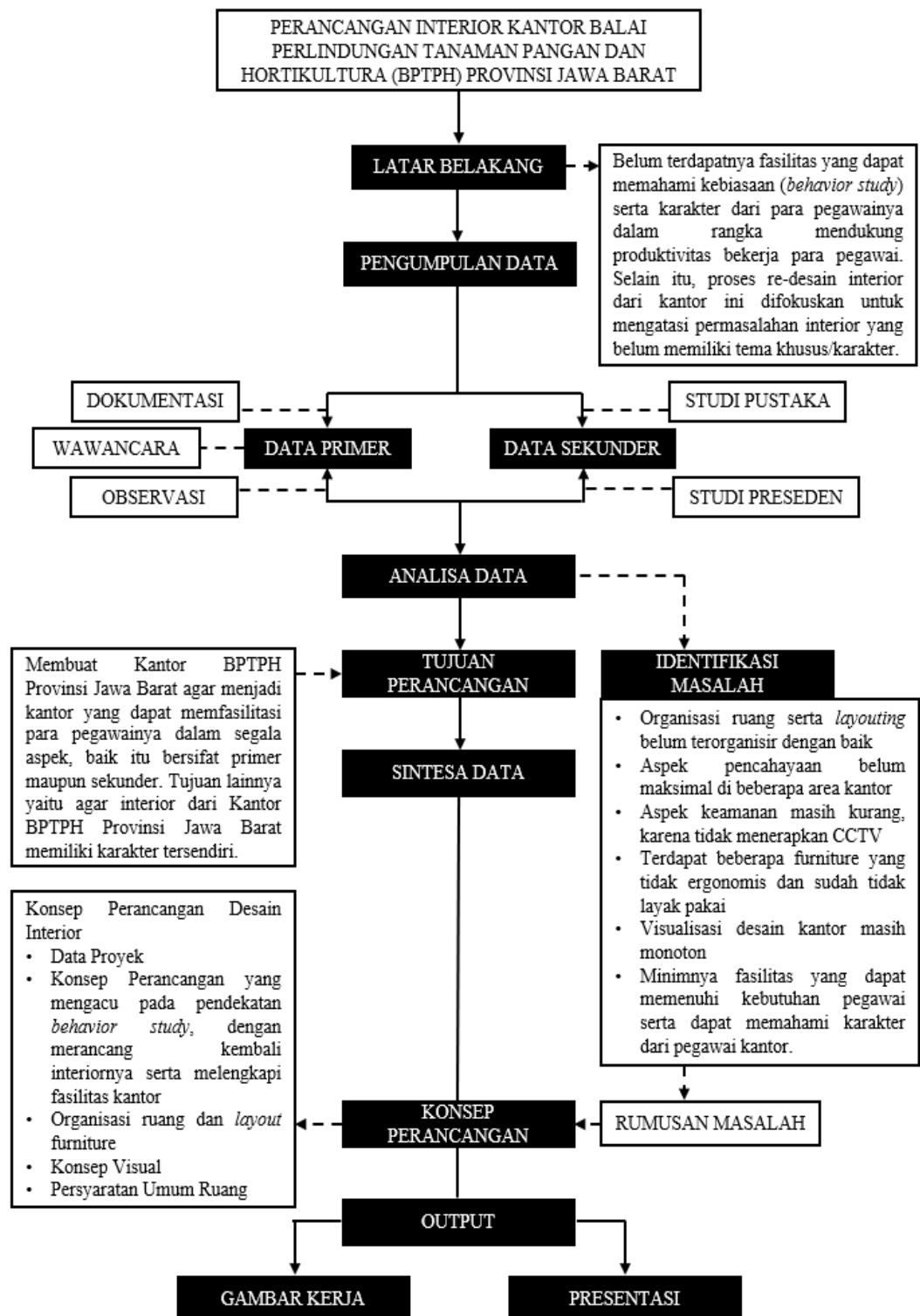
Proses dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa foto dari area-area yang terdapat pada objek perancangan maupun objek studi banding. Hasil dokumentasi ini dapat berguna sebagai gambaran yang bersifat realistis dari kondisi eksiting dari objek perancangan maupun objek studi banding. Selain itu, hasil dari dokumentasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan analisa objek perancangan maupun objek studi banding, sehingga akan ditemukan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam objek perancangan.

#### 1.7.1.5 Studi Literatur

Studi literatur ini dapat berguna sebagai sumber referensi serta landasan teori yang akan dijadikan pedoman ketika melakukan proses perancangan, sehingga hasil dari proses perancangan ini dapat memenuhi standar-standar yang berlaku. Beberapa studi literatur yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang sifatnya valid, diantaranya yaitu beberapa buku yang menjelaskan mengenai standar-standar yang berlaku dalam perancangan (Human Dimension & Interior Space, Data Arsitek, dll), beberapa Laporan Tugas Akhir yang telah dibuat oleh mahasiswa senior, jurnal-jurnal yang membahas mengenai permasalahan yang diangkat maupun mengenai objek perancangan serupa, serta beberapa dokumen resmi yang dimiliki oleh pihak kantor yang menjadi objek perancangan tersebut.

### 1.8 Kerangka Berpikir

Berikut terdapat bagan yang menjelaskan kerangka berpikir yang digunakan selama proses perancangan berlangsung.



## 1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang diaplikasikan dalam proses pembuatan proposal ini yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi uraian-uraian mengenai latar belakang perancangan interior dari Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran perancangan, batasan perancangan, manfaat perancangan, metode perancangan, serta kerangka berpikir.

### **BAB II: KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN**

Kajian literatur dan data perancangan ini berisi uraian-uraian dari kajian dari beberapa literatur terpilih yang membahas mengenai kantor secara umum, standar-standar yang berlaku dalam perancangan kantor, pendekatan desain terkait yang akan diangkat, analisa studi kasus perancangan objek lain yang serupa, serta analisa data-data proyek.

### **BAB III: KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR**

Bagian ini membahas mengenai tema perancangan, konsep perancangan, organisasi ruang, *layouting*, konsep bentuk, material, warna, aspek pencahayaan, aspek penghawaan, aspek keamanan, pengaplikasian akustik pada ruang kantor yang telah dipertimbangkan sedemikian rupa.

### **BAB IV: KONSEP PERANCANGAN VISUAL DENAH KHUSUS**

Bagian ini berisi uraian-uraian mengenai denah khusus yang telah terpilih, konsep tata ruang, persyaratan teknis ruang terkait, serta pemaparan mengenai elemen interiornya.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini merupakan bagian penutup atau akhir dari penulisan proposal. Membahas mengenai kesimpulan serta saran dari proses perancangan yang telah dilakukan pada objek perancangan terpilih, yaitu Kantor Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**